

ANALISIS KENDALA PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PRODUKSI KAPAL DI PT. PAL INDONESIA

ANALYSIS OF CONSTRAIN IN USING OF LOCAL CONTENT IN SHIP PRODUCTION AT PT. PAL INDONESIA

Anggy Periska PR¹, Timbul Siahaan², Sovian Aritonang³

Universitas Pertahanan
(anggy.periska@tp.idu.ac.id, soviannaritonang@idu.ac.id)

Abstrak – Ancaman adalah usaha dan kegiatan yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yang timbul dalam negeri yang dinilai membahayakan keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut dibutuhkan upaya pertahanan melalui usaha membangun dan membina kemampuan serta daya tangkal negara, baik secara militer maupun nirmiliter. Untuk itulah dibutuhkan pertahanan negara yang kuat sehingga kedaulatan NKRI akan tetap terjaga. Salah satu bentuk pertahanan negara adalah dengan memberdayakan industri dalam negeri untuk memproduksi Alpalhankam yang dibutuhkan. Selain berdayanya industri pertahanan dalam negeri, penggunaan komponen lokal juga menjadi salah satu indikator industri pertahanan yang mandiri. Dalam mewujudkan penggunaan komponen dalam negeri, industri masih cukup kesulitan dalam pemenuhan yang sesuai dengan amanat undang-undang oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam pemenuhan penggunaan komponen dalam negeri ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara dengan berbagai instansi termasuk industri itu sendiri. Setelah melakukan wawancara ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh industri pertahanan yaitu (1) Skema pembiayaan yang menggunakan pembiayaan luar negeri jenis Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), (2) Belum adanya standarisasi komponen yang digunakan pada pembuatan kapal, (3) Masih banyak komponen yang harus diimpor, (4) Tidak adanya keberlanjutan penggunaan komponen bagi tier 3 dan 4, (5) Belum ada industri manufaktur yang sesuai dengan kebutuhan galangan kapal.

Kata Kunci: Alpalhankam, Kendala, Kemandirian Industri Pertahanan, Komponen Dalam Negeri, Pertahanan Negara

Abstract – Threats are efforts and activities that originate from abroad or are transnational in nature or that arise domestically that are considered endangering the integrity of the country's territory and the safety of the nation. In dealing with these threats defense efforts are needed through efforts to build and foster the ability and deterrence of the state, both military and non-military. For that, a strong national defense is needed so that the sovereignty of the Republic of Indonesia will be maintained. One form of national defense is to empower domestic industries to produce the Defense and Security Equipment which needed. One form of empowering the domestic defense industry is using of local contents as an indicator of self reliant. In realizing using of local contents, the industry is still difficult to fulfill based on the mandate of the law, therefore this study was done to analyze the constraints which facing by defense industry to fulfilling using of local contents. This research was done using qualitative methods, that is interviews with various agencies including the industry. After do the interviews, researcher found several constratin which facing by the defense industry, that are

¹ Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

(1) financial schemes which use foreign financial scheme that is Export Credit Guarantee Agency (LPKE), (2) There is no standardization of components use in shipbuilding, (3) There are still many components that must be imported, (4) There is no continuing use of components for tiers 3 and 4, (5) There is no manufacturing industry that suits the needs of the shipyard.

Keyword: Defense and Security Equipment, Constraints, Self Reliant of Defense Industry, Local Content, National Defense

Pendahuluan

Ancaman adalah usaha dan kegiatan yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yang timbul dalam negeri yang dinilai membahayakan keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa⁴. Segala sesuatu yang membahayakan dan mengancam stabilitas yang akan menyebabkan perpecahan, hilangnya kedaulatan suatu negara, bahkan hingga mengancam keutuhan wilayah dan keselamatan warga negara. Dalam buku Doktrin Pertahanan Negara, berdasarkan jenisnya ancaman dibedakan dalam tiga golongan yaitu:

- Ancaman Militer
- Ancaman Hibrida
- Ancaman Non Militer

Sedangkan pada Buku Putih Pertahanan menyebutkan bahwa ancaman terbagi dua⁵ yaitu:

- Ancaman nyata
- Ancaman tidak nyata

Segala usaha yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa adalah bentuk pertahanan negara. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman⁶. Sistem pertahanan negara yang ada di Indonesia merupakan sistem pertahanan semesta⁷. Untuk mendukung sistem pertahanan negara dibutuhkan Alutsista dan juga Alpalhankam lainnya.

⁴ Kementerian Pertahanan, *Buku Doktrin Pertahanan*, (Jakarta, 2014)

⁵ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan*, (Jakarta, 2015)

⁶ Peraturan Menteri Pertahanan No.16 Tahun 2012

⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Produk Alpalhankam dan Alutsista mempunyai peran penting terhadap keberhasilan atau kegagalan perang dan juga bisa memberikan *deterrence effect* atau efek gentar bagi negara lain. Efek gentar ditujukan agar tidak ada negara lain yang berpikir untuk menyerang negara tersebut, sehingga peperanganpun bisa dihindarkan. Selain itu, efek gentar juga biasanya dimanfaatkan oleh banyak negara untuk memperkuat setiap usaha-usaha diplomasi yang sedang dan akan dilakukan. Hal ini juga merupakan perwujudan dari usaha pertahanan negara dan strategi yang fundamental untuk pencegahan perang.

Dalam rangka pertahanan negara dan mempertahankan kedaulatan negara, ada banyak peralatan yang dibutuhkan untuk menjaga pertahanan negara. Pada tahun 2009 Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) merumuskan beberapa peralatan penting yang dianggap bisa menjadi garda depan pertahanan. Rumusan yang dibuat oleh KKIP ini disebut *Roadmap* Industri Pertahanan yang didalamnya memuat tujuh program prioritas yang terdiri dari

tujuh macam alat pertahanan yakni Pesawat Tempur, Kapal Selam, *Medium Tank*, Radar, Roket, Rudal dan Propelan⁸.

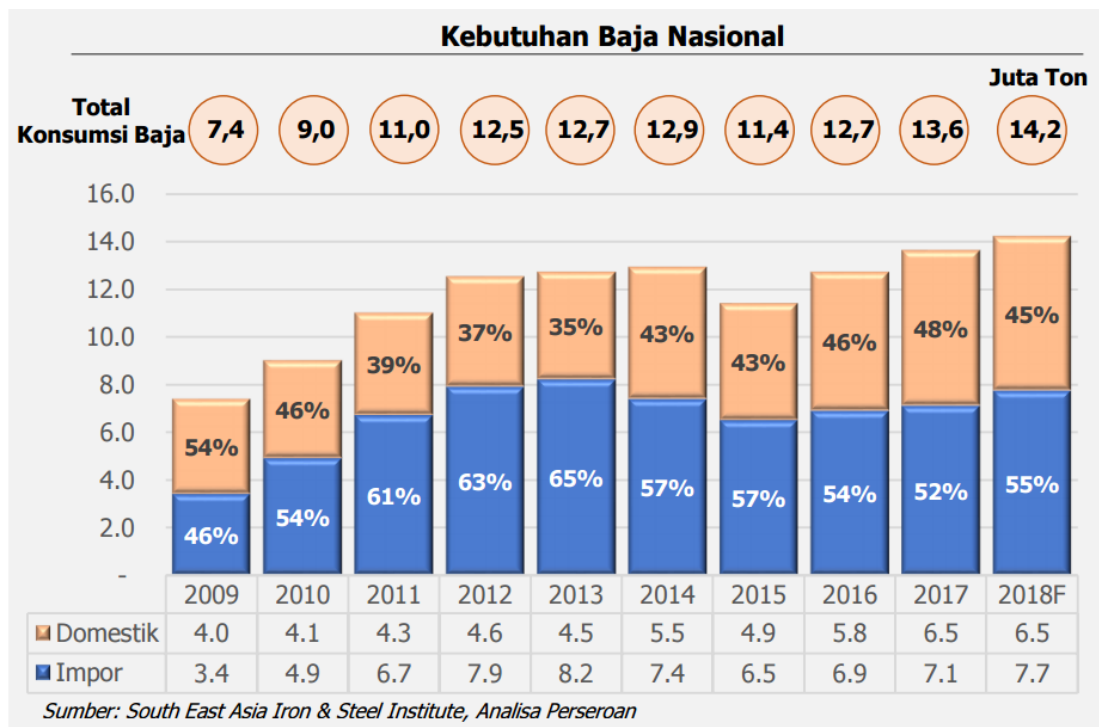
Ketujuhnya merupakan peralatan pertahanan dan keamanan yang masing-masing sudah dipegang oleh industri pertahanan terkait dengan beberapa industri sebagai *Lead Integrator* yang bertanggung jawab untuk perkembangan peralatan tersebut. Pada tahapan produksi ada beberapa peraturan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Industri Pertahanan baik itu produksi dalam negeri maupun kerjasama dengan negara lain. Salah satunya adalah untuk menggunakan kandungan lokal atau bahan baku dari dalam negeri pada produksi tersebut selain itu penggunaannya pun harus meningkat setiap tahunnya. Bahan baku utama yang digunakan Industri Pertahanan untuk memproduksi Alpalhankam dan Alutsista adalah baja. Menurut data, pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat keenam dalam produksi baja kasar (*crude steel*) yang mencapai 8 juta ton perhari⁹.

Direktur Industri Logam Kemenperin mengatakan bahwa total produksi baja kasar seperti *slab* dan *billet*

⁸ Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan

⁹ Sella Panduarsa Gareta. "Produksi Baja Kasar Indonesia Peringkat Enam Asia", dalam

<https://www.antaranews.com/berita/632171/p/produksi-baja-kasar-indonesia-peringkat-enam-asia>, 30 Mei 2017, diakses pada 28 Juli 2019



Gambar 1. Kebutuhan Baja Nasional
 Sumber: Public Expose PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. (2019)¹⁰

mencapai 7,8 juta ton pada tahun 2017, sementara jumlah konsumsi nasional sebanyak 13,6 juta ton (Industri baja nasional dipacu penuh kebutuhan domestik, 2019). Data ini sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.

Produksi Alpalhankam dan Alutsista sebagai salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pertahanan harus direncanakan dengan matang oleh pemerintah Indonesia terutama dalam kolaborasinya dengan industri pertahanan yang ada di Indonesia baik itu BUMNIP maupun BUMNIS.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan (2016), mengatakan setidaknya ada 5 permasalahan yang masih dihadapi industri nasional¹¹, yaitu:

- Bahan baku industri masih diimpor
- Kebutuhan lahan untuk industri masih kurang
- Pembiayaan industri belum kompetitif
- Penggunaan produk dalam negeri masih minim
- Banyaknya produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri

Mengenai pemanfaatan sumber daya dalam negeri atau komponen lokal

¹⁰ Public Expose PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. (2019)

¹¹ Rahajeng KH dan Ridho Syukra. “Kadin 5 Masalah Dihadapi Industri Nasional”. Retrived

from <https://investor.id/industry-trade/kadin-5-masalah-dihadapi-industri-nasional>, 15November 2016, diakses pada 28 Agustus 2019.

pada produksi Alutsista dan Alpalhankam ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2014 hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kandungan lokal ini penting. Bukan hanya dalam sektor pertahanan dan produksi Alutsista dan Alpalhankam, penggunaan komponen dalam negeri untuk produk-produk buatan dalam negeri juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya dalam berbagai sektor.

Peraturan mengenai pengawalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 tahun 2014. Dari peraturan tersebut perhitungan TKDN melingkupi beberapa poin yaitu:

- Harga barang
- Biaya produksi
- Asal barang

Dengan kriteria-kriteria tersebut maka pemanfaatan kandungan dalam negeri sendiri mampu dikawal pengimplementasiannya agar bisa menjadi perhatian khusus bagi industri pertahanan baik itu *Lead Integrator* maupun Industri pendukung lainnya. Setiap Industri Pertahanan dikelompokkan berdasarkan kemampuannya untuk mendukung industri utama. Pengelompokan ini dibagi dalam 4 tier. Tier 1 adalah industri alat utama atau *Lead Integrator* yaitu PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pindad dan PT. PAL Indonesia, Tier 2 adalah industri komponen utama dan/atau penunjang, Tier 3 adalah industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) dan Tier 4 adalah industri bahan baku untuk bahan peledak.

Tabel 1. Klasterisasi Industri Pertahanan

No.	Bidang usaha	KBLI	Persyaratan
1	Industri Alat Utama	25200 25934 30300 30400	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Menteri Pertahanan
2	Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang	20292	a. Penanaman modal asing maksimal 49% dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Menteri Pertahanan
3	Industri Kompenen Utama dan/atau Pendukung (Perbekalan)	20292	a. Penanaman modal asing maksimal 49% dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Menteri Pertahanan
4	Industri Bahan Baku untuk Bahan Peledak	20114	a. Penanaman modal asing maksimal 49% dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Menteri Pertahanan

Sumber: Berita Pindad, 2018

Masing-masing Industri Pertahanan memiliki tugas dan fungsinya dalam mendukung produksi Alutsista tersebut. Berdasarkan pembagian tugasnya terdapat empat klasterisasi industri pertahanan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Sebagaimana disebutkan Tier 1 merupakan *Lead Integrator*, pada tahun 2013 KKIP mengeluarkan Surat Keputusan mengenai penunjukan PT. PAL sebagai *Lead Integrator* untuk matra laut. Penunjukan PT. PAL sebagai *Lead Integrator* Alutsista matra laut diputuskan oleh KKIP setelah mengadakan sidang pleno keenam di Surabaya pada Mei 2012 (Witjaksono, 2012) dan secara resmi tertulis pada Surat Keputusan KKIP pada 17 Desember 2013, SK No.KEP/12/KKIP/XII/2013 (pal.co.id). Dengan adanya SK ini maka sesuai dengan fungsinya, PT. PAL Indonesia bertanggung jawab dalam proses produksi Alutsista laut untuk mendukung pertahanan negara.

Saat ini PT. PAL sudah memiliki banyak kapal produksinya sendiri antara lain kapal selam, kapal PKR hasil kerja sama dengan Damen, Belanda, Kapal

KCR, Kapal LPD dan juga kapal-kapal niaga. Berdasarkan produksi-produksi yang sudah dilakukan oleh PT. PAL, peneliti ingin melakukan penelitian untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh industri pertahanan dengan menjadikan PT. PAL sebagai objek penelitian. Sehingga akan diketahui kendala apa saja yang dihadapi industri dalam pemenuhan penggunaan komponen dalam negeri.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif¹². Penelitian awal akan dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap nilai capaian penggunaan komponen dalam negeri yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan perbandingan terhadap standar capaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Setelah didapatkan hasilnya maka akan dilanjutkan dengan metode kualitatif

¹² John W. Creswell, *Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi 4)*, (California: Sage Publication, 2014)



Gambar 2. Desain Penelitian
 Sumber: John W. Creswell, 2014

yaitu pelaksanaan wawancara pada *triple helix*.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah *mixed method*. Dimana akan dilakukan proses penelitian dengan menggunakan dua metode pada masing-masing penelitian seperti digambarkan dalam Gambar 2.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian¹³. Pada penelitian ini terdapat beberapa informan atau narasumber yang kompeten di bidangnya dan yang bersangkutan adalah pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema komponen dalam negeri dan merupakan sumber data primer bagi penelitian ini. Narasumber dipilih dengan kriteria yang

berhubungan dengan komponen dalam negeri dimana merupakan individu/kelompok/instansi yang berperan dan atau terlibat dalam perumusan kebijakan maupun pelaksana kebijakan mengenai komponen dalam negeri. Narasumber diambil sebagai perwakilan dari *triple helix*.

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah PT. PAL Indonesia yang merupakan *Lead Integrator* matra laut yang mendukung pertahanan negara.

Teknik Pengumpulan data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait penggunaan komponen dalam negeri.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010)

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyusun pedoman wawancara berdasarkan kapasitas dan kapabilitas dari informan yang dituju, proses wawancara ini akan dibantu dengan alat perekam. Hasil dari wawancara ini akan ditranskripsikan dalam bentuk tulisan. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pertanyaan terbuka agar mampu lebih dalam menggali gagasan informan mengenai obyek penelitian.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menyadari keabsahan data merupakan salah satu kekuatan pada penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, dan pembaca¹⁵. Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data penulis lakukan selama proses penelitian ini dilakukan.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam melakukan pemenuhan terhadap penggunaan komponen dalam negeri, Industri komponen kapal memiliki peran

yang sangat penting dalam mendukung kemajuan industri galangan kapal dan industri pelayaran nasional¹⁶. Pada produksi kapal pendukung pertahanan ada banyak komponen yang terbagi dalam beberapa bagian. Berdasarkan penuturan Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi Korporasi, ada 5 bagian utama dalam kapal tersebut yaitu *Hull construction*, *Machinery outfitting*, *Hull outfitting*, *Painting and Protection* dan *Electrical outfitting*. Sebelum menyusun komponen tersebut salah satu hal yang harus sangat diperhatikan adalah bagian mesin. Pemilihan dan penempatan sistem penggerak kapal baik ukuran kecil maupun ukuran besar (30 GRT) harus ditentukan oleh faktor penggunaan maka harus ada sinkronisasi kerja yang efektif antara lambung kapal dengan sistem penggeraknya¹⁷. Melihat belum adanya bahan utama yang bersumber dari produk lokal indonesia, sangat diharapkan agar industri pertahanan baik itu *Lead Integrator* maupun Industri pendukung dapat saling menggerakkan

¹⁵ John W. Creswell, *Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi 4)*, (California: Sage Publication, 2014)

¹⁶ Taufan Prasetyo, Buana Ma'ruf & Aries Sulisetyono, "Analisis Perkembangan Industri

Komponen Kapal Dalam Negeri", *Jurnal Wave*, Vol. 10, No.2, 2016. hlm. 39-46.

¹⁷ Setyo Leksono, "Sinkronisasi Propeller dengan Mesin Induk pada Kapal Ikan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja", *Jurnal Wave*. Vol. 10, No.1, 2015, hlm. 19-24.

pertumbuhan dan memperdayakan industri dalam negeri dengan mewajibkan instansi penyedia jasa dan barang untuk menggunakan produk dalam negeri.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber terkait dengan komponen dalam negeri ditemukan beberapa kendala dalam perjalanan pemenuhan penggunaan komponen dalam negeri ini. Kendala-kendala ini peneliti dapatkan berdasarkan hasil observasi di lapangan dan juga hasil wawancara dengan narasumber yaitu PT. PAL sebagai industri strategis yang merupakan lokus utama, kemudian dari beberapa instansi yaitu Kementerian Pertahanan dan juga Kepala Sub Direktorat *Transfer of Technology* Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Kasubdit ToT KKIP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan TKDN ini yaitu:

- Skema Pembiayaan yang menggunakan pembiayaan Luar negeri Jenis Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Skema Pembiayaan Luar negeri, terdapat dua macam skema yaitu

1) Kredit Swasta Asing (KSA)

Pendanaan jenis ini bisa dikatakan cukup menguntungkan karena negara pemberi pinjaman akan memberikan pinjamannya berupa uang, dimana negara penerima pinjaman bisa memanfaatkan dan memutar kembali uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Apakah akan dibelanjakan didalam negeri atau diluar negeri tergantung dari apa yang diinginkan.

2) Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)

Berbeda dengan KSA, LPKE adalah jenis pinjaman yang memberikan keuntungan kepada negara pemberi pinjaman sebab negara tersebut bebas untuk memberikan pinjaman dalam bentuk apapun baik uang ataupun barang berupa komponen yang dibutuhkan untuk produksi.

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang merugikan bagi Indonesia, karena untuk pembiayaan ini negara tidak memiliki kemampuan apapun untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Pembiayaan jenis LPKE ini memberikan kebebasan kepada negara pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman dalam bentuk barang sehingga

¹⁸ Roselina Rahmawati, "Kajian Proses Pelaksanaan dan Perhitungan TKDN", 2016

komponen yang digunakan berasal dari negara tersebut.

- Belum adanya standarisasi komponen dalam pembuatan kapal

Menurut Kasubdit Alih Teknologi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Banyak lembaga yang membuat kapal dengan fungsi yang sama misalnya kapal patroli, beberapa instansi membuat kapal patroli yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi, Badan Keamanan Laut, Kementerian Perhubungan dan juga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi setiap instansi tersebut melakukan pemesanan ditempat yang berbeda sehingga secara otomatis komponen yang digunakan juga berbeda yang menyebabkan tidak ada keberlangsungan bagi komponen lokal dalam negeri untuk mensuplai komponen yang dibutuhkan untuk kapal patroli. Jika dibuat standarisasi maka industri lokal akan lebih bisa berkembang, setidaknya untuk komponen inti yang ada pada kapal bisa tetap dipenuhi oleh industri dalam negeri.

- Masih banyak komponen yang harus diimpor

Sebagai penentu *requirement* yang sesuai dengan kebutuhannya, *user* atau *owner* adalah satu-satunya yang berhak

atas apa yang akan digunakan pada kapal atau barang yang dipesan. *Requirement* ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh *user* atau *owner* sehingga yang bersangkutan juga berhak menentukan apa merk komponen bahkan darimana komponen tersebut didatangkan. Dalam hal ini memang *user* sebagai pemilik produk nantinya memiliki wewenang yang besar, akan tetapi jika suatu komponen harus dibeli langsung dari luar negeri maka akan memperkecil nilai penggunaan komponen dalam negeri dan juga TKDNnya. Menurut Kepala Sub Direktorat Alih Teknologi Komite Kebijakan Industri Pertahanan rasa ketidakpercayaan atau ketidakyakinan akan produk dalam negeri mungkin masih menjadi ancaman tersendiri takut jika nanti produk yang digunakan tidak sesuai dengan harapan.

- Tidak ada *sustainability* bagi industri kecil

Keberlanjutan atau *sustainability* merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan dan produksi suatu produk, termasuk dalam bidang pertahanan. Dalam hal ini Laksda Rahmat Lubis dari KKIP menyebutkan bahwa “industri pertahanan saat ini belum sesuai dengan harapan” hal ini berkaitan dengan sedikitnya kebutuhan akan komponen

untuk membuat produk yang berakibat pada produksi komponen yang dilakukan. Sebagai industri yang harus memiliki keuntungan untuk keberlangsungan operasional dengan kebutuhan bidang pertahanan yang masih sangat minim, membuat industri cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan komponen. Pembuatan komponen yang cukup mahal dengan kuantitas yang sedikit tentu saja akan membuat sebuah industri merasa berat karena hal tersebut akan mempengaruhi modal dan juga keuntungan yang didapatkan.

- Belum ada industri manufaktur yang sesuai kebutuhan

Industri manufaktur yang dimaksud disini adalah industri dalam negeri yang mampu membuat komponen utama sesuai dengan kebutuhan PT. PAL dalam memproduksi kapal. Selain itu juga tidak ada industri manufaktur luar negeri yang membuka cabangnya di Indonesia sehingga pembelian di luar negeri bisa dialihkan di dalam negeri dengan bahan baku menggunakan bahan yang ada di Indonesia dan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal sehingga angka untuk nilai TKDN akan semakin besar. Dengan adanya manufaktur ini juga bisa mengurangi biaya untuk pengiriman, jika sebelumnya harus dikirim dari luar negeri

dengan biaya yang cukup besar maka jika industri tersebut ada di Indonesia akan mengurangi biaya tersebut. Selain itu industri yang ada didalam negeri juga akan menghemat waktu pengiriman sehingga akan lebih cepat untuk bisa digunakan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan penggunaan komponen dalam negeri yaitu:

- Skema pembiayaan yang menggunakan pembiayaan luar negeri jenis Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)
- Belum adanya standarisasi komponen yang digunakan pada pembuatan kapal
- Masih banyak komponen yang harus diimpor
- Tidak adanya keberlanjutan penggunaan komponen bagi tier 3 dan 4
- Belum ada industri manufaktur yang sesuai dengan kebutuhan galangan kapal

Dari hasil penelitian peneliti memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa

dilanjutkan dengan penelitian yang lebih matang dan bisa dicari solusi untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan penggunaan komponen dalam negeri.

Daftar Pustaka

Buku

Creswell, Jhon W. (2014). *Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi 4. California: Sage Publication.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Buku Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015) *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta.

Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Leksono, Setyo. (2015). "Sinkronisasi Propeller dengan Mesin Induk pada Kapal Ikan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja." *Jurnal Wave*. Vol. 10(1), hh. 19-24.

Prasetyo, Taufan., Buana Ma'ruf., Aries Sulisetyono. (2016). "Analisis Perkembangan Industri Komponen Kapal Dalam Negeri". *Jurnal Wave*. Vol. 10 (2), hh. 39-46.

Rahmawati, Roselina. (2016). "Kajian Proses Pelaksanaan dan Perhitungan TKDN". <http://dx.doi.org/10.33021/jie.v1i2.347>, diakses pada 3 september 2019.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Website

Gareta, Sella Pauduarsa. "Produksi Baja Kasar Indonesia Peringkat Enam Asia". Retrived from <https://www.antaraneews.com/berita/632171/produksi-baja-kasar-indonesia-peringkat-enam-asia>, diakses pada 28 Juli 2019.

KH, Rahajeng dan Ridho Syukra. "Kadin 5 Masalah Dihadapi Industri Nasional". Retrived from <https://investor.id/industry-trade/kadin-5-masalah-dihadapi-industri-nasional>. Diakses pada 28 Agustus 2019.

PT. PAL. "PAL Indonesia siap penuh armada perang AL". Retrived from <https://www.pal.co.id/publikasi/news/931?lang=ina>, diakses pada 29 agustus 2019.

Siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI. "Kemhan Sosialisasikan Bela Negara Kepada Humas Pemerintah". Retrived from <https://www.kemhan.go.id/puskom-publik/2016/05/11/kemhan-sosialisasikan-bela-negara-kepada-humas-pemerintah-2.html>, diakses pada 28 Juli 2019.

Majalah dan Dokumen

Medium Tank, Membangun Kemandirian Alutsista Dalam Negeri. (2018). Berita Pindad, Volume 1, h.17.

Public Expose PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. (2019).

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. PT. PAL Indonesia

Narasumber: Kepala Departemen Pengadaan Material

- Bagaimana peran divisi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan material produksi? (sebatas menerima atau seperti apa?)
- Dalam produksi kapal apakah kebutuhan impor lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri?
- Apa yang bisa divisi pengadaan material lakukan dalam mendukung kemandirian industri melalui penggunaan komponen dalam negeri?

Narasumber: Kepala Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi Korporasi

- Bagaimana urgensi pemenuhan TKDN bagi produksi kapal?

- Apa ada peraturan yang menjadi acuan PT. PAL dalam pemenuhan TKDN?
- Untuk produksi kapal LPD, berapa persen perbandingan kebutuhan impor dan dalam negeri? Apa yang menjadi kendalanya?
- Bagian mana yang menentukan komponen yang harus diimpor dan bisa dibeli didalam negeri saja (dalam pemilihan vendor)? Apakah tim produksi memiliki wewenang untuk hal tersebut?

2. Komite Kebijakan Industri Pertahanan

- Terkait peraturan TKDN, Bagaimana implementasi dari peraturan terkait TKDN?
- Untuk pemesanan alpalhakam melalui KKIP atau tidak?
- Bagaimana koordinasi KKIP dengan Indhan sebagai controlling? Dan bagaimana koordinasi antar indhan?
- Upaya KKIP untuk mendorong industri komponen?

3. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

- Bagaimana peran Ditjen Potan dalam peningkatan TKDN?

- Bagaimana koordinasi Dirjen Pothan dengan Industri Pertahanan?
- Bagaimana pengawalan nilai TKDN agar industri fokus kepada hal tersebut dan nilai TKDN tercapai?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam pencapaian tersebut?
- Apa aja indikator kemandirian industri pertahanan?